

# POTENSI RADIKALISME ISLAM FUNDAMENTAL DI DAERAH TUJUAN WISATA DI KABUPATEN WAKATOBI

*La Ode Anhusadar*

IAIN Kendari

email: sadar.wanchines@gmail.com

**Abstract:** *This research was conducted to know the determine of socio-historical background of the reason fundamentalist growing and movement in tourist destinations wakatobi. It is also to know denominations growing up in Wakatobi and to know and understand the religious groups activities in Wakatobi. This research was using qualitative research methods that is in Wakatobi. The technique of data collecting is interviewing, observations and documentation. The results of this study describe that the social historical background of the development of radicalism in wakatobi are: political pressure factor, emotional factors of religion, cultural factors, ideological of syariah, government policy, mass media, religion comprehension, the religious and nationalist factor, back to as the qur'an and the sunnah, and factors jihad. Religious groups that fall into radical islam is a group of HTI Wakatobi. Wakatobi denominational schools such as DPD 2 Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) Wakatobi is that based islamic missionary movement within the unitary state of Indonesia is based on Pancasila and the constitution of 1945.*

**المخلص:** تم إجراء هذا البحث بهدف التعرف على الخلفية الاجتماعية والتاريخية لما تطورت عليها الحركة الأصولية في الوجهة السياحية في واكاتوبي ولمعرفة نوع الجماعات الدينية التي ظهرت في واكاتوبي. ولمعرفة فهم وأنشطة الجماعات الدينية في واكاتوبي. يتم إجراء هذا البحث باستخدام طريقة البحث النوعي، ويتم هذا البحث في واكاتوبي ريجنسي. التقنيات التي يمكن استخدامها لجمع البيانات في هذه الدراسة هي: المقابلة والملاحظة والتوثيق. توضح نتائج هذه الدراسة أن الخلفية الاجتماعية التاريخية للراديكالية في

واكاتوبي هي عامل الضغط السياسي والعوامل العاطفية الدينية والعوامل الثقافية والعوامل الإيديولوجية للشريعة الإسلامية وعامل سياسة الحكومة وعامل الإعلام الجماهيري والفهم الديني وعوامل الدين و الدولة وعامل العودة إلى القرآن والسنة ، وعوامل الجهاد .اما عن المجموعة الدينية المتضمنة في الإسلام الراديكالي هي مجموعة حزب التحرير إندونيسيا فرع واكاتوبي.وهي حركة الدعوة القائمة على الإسلام في دولة جمهورية إندونيسيا القائم على أساس بنجاسيلا ودستور ١٩٤٥.

**Abstrak:** *Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang sosio historis mengapa gerakan fundamentalis berkembang di daerah tujuan wisata di Wakatobi. Juga bertujuan untuk mengetahui kelompok-kelompok keagamaan seperti apa yang muncul di Wakatobi dan untuk mengetahui paham dan aktifitas kelompok-kelompok keagamaan di Wakatobi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Wakatobi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa latar belakang sosial historis berkembangnya paham radikalisme di Wakatobi adalah faktor tekanan politik, faktor emosi agama, faktor kultural, faktor ideologis syariat islam, faktor kebijakan pemerintah, faktor media massa, pemahaman agama, faktor agama dan negara, faktor kembali kepada Alquran dan Sunah, dan faktor jihad. Kelompok agama yang masuk dalam Islam radikal adalah kelompok Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) Wakatobi. Paham kelompok keagamaan di Wakatobi, seperti DPD II HTI Kabupaten Wakatobi, merupakan gerakan dakwah yang berazaskan Islam di dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*

**Keywords:** fundamentalis, kelompok keagamaan, HTI, Wakatobi.

## PENDAHULUAN

Fundamentalisme dan kekerasan agama merupakan isu paling hangat belakangan ini dalam wacana pencatutan global yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian terhadap dua persoalan ini yakni

fundamentalisme identik dengan kekerasan. Bahkan sampai saat ini, Eropa memahami fundamentalis identik dengan teror yang dilakukan oleh kelompok militan Islam dengan agenda utama jihad. Inilah stereotip yang dilestarikan Barat selama berabad-abad. Islam fundamentalis merupakan penyebab terjadinya berbagai tindakan kekerasan, bom bunuh diri, pembunuhan, pembantaian, peperangan dan penghancuran. Doktrin perang suci atau jihad yang menjadi keyakinan yang diusung fundamentalisme memperkuat stereotip itu.

Di Indonesia, ada dua warisan Barat yang direaksi keras oleh kelompok fundamentalis (dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia/HTI). *Pertama*, liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. *Kedua*, demokrasi yang Eropa sentris yang dianggapnya bertentangan dengan sistem yang dikehendaki Tuhan. Mereka menginginkan diterapkannya kembali sistem khilafah untuk dapat menjawab berbagai persoalan bangsa yang tidak kunjung selesai. “Selamatkan Indonesia dengan syariat”, kata mereka.

## **FAHAM RADIKALISME**

Radikalisme berasal dari bahasa Latin, *radix yang berarti akar*. Istilah yang digunakan pada akhir abad ke 18 di barat untuk merujuk cita-cita, ide, dan gagasan pendukung gerakan yang menuntut perubahan yang mendasar. Sedangkan radikalisasi merupakan proses dimana seseorang individu atau kelompok mulai mengadopsi cita-cita dan aspirasi politik, sosial, atau agama yang ekstrim. Radikalisasi bisa pula diartikan sebagai proses lanjutan dari ekstrimisme, yakni perubahan pemahaman dari pandangan moderat atau pandangan umum ke arah pandangan ekstrim.

Di Indonesia kelompok radikal banyak macamnya, mulai dari sekedar berpandangan radikal hingga aksi radikal, kekerasan. Setidaknya, kelompok radikal itu dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu:

### **1. Kelompok radikal gagasan**

Kelompok ini gencar mengemukakan gagasan, ide dan pikiran yang radikal dan ekstrim baik terkait isu politik, ekonomi maupun keagamaan yang berbeda dengan pandangan kebanyakan. Walaupun kelompok ini tidak terlibat langsung dalam aksi kekerasan, kelompok ini juga berbahaya karena gagasan-gagasannya yang

radikal dan ekstrim, misalnya ingin merubah dasar negara melalui tulisan atau mimbar bebas yang mengancam pandangan anak muda dan kita semua tentang wawasan bernegara.

2. Kelompok radikal kekerasan non terorisme

Kelompok ini radikal secara tindakan dalam wujud aksi kekerasan seperti residivisme, gangsterisme, vandalisme, atau kelompok kekerasan yang mengatasnamakan agama dengan melakukan intimidasi, kekerasan fisik dan perusakan. Kelompok ini juga berbahaya karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam prakteknya mereka cenderung merusak hubungan toleransi dan kerukunan antar masyarakat yang berbeda agama.

3. Kelompok radikal milisi

Gerakan dalam bentuk milisi yang terlibat dalam konflik komunal, seperti laskar jihad, laskar mujahidin dan laskar jundullah, dll. Layaknya tentara, mereka dilengkapi dengan persenjataan dan semakin memperkeruh suasana di wilayah konflik.

4. Kelompok radikal separatistis

Kelompok ini merupakan gerakan terorganisir yang mengusung misi separatisme atau pemisahan diri dari negara. Contoh gerakan ini misalnya kelompok radikal NII, GAM, OPM, dan RMS. Tentu saja gerakan ini berbahaya untuk keutuhan dan kesatuan negara.

5. Kelompok radikal terorisme

Kelompok yang menafsirkan ajaran keagamaan secara salah melalui pemahaman yang ekstrim dan mewujudkan dalam aksi teror dan kekerasan.

6. Kelompok radikal lainnya.

7. Kelompok yang menyuarakan kepentingannya secara radikal dan ekstrim baik dalam isu politik, sosial, budaya, ekonomi dll.

## **ISLAM FUNDAMENTALIS**

Sebenarnya istilah Fundamentalisme Islam bukanlah murni dari khazanah masyarakat Muslim. Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh kalangan akademisi Barat dalam konteks sejarah keagamaan dalam masyarakat Barat sebagai reaksi dan negasi terhadap modernisme. Kalangan Muslim tertentu sebenarnya berkeberatan dengan penggunaan istilah “fundamentalisme”, karena konteks historis istilah ini berawal dari “fundamentalisme” Kristen. Sebagai gantinya, mereka menggunakan

istilah *uṣūliyyūn* untuk menyebut “orang-orang fundamentalis”, yakni mereka yang berpegang kepada fundamen-fundamen pokok Islam sebagaimana terdapat dalam Alquran dan Hadits. Istilah lain yang digunakan adalah *Al-Uṣūliyah al-Islāmiyah* (fundamentalis Islam) yang mengandung pengertian : kembali kepada fundamen-fundamen keimanan; penegakan kekuasaan politik ummah; dan penguatan dasar-dasar otoritas yang absah (*shar’iyah al-ḥukm*). Formulasi ini, terlihat lebih menekankan dimensi politik gerakan Islam dari pada aspek keagamaannya.

Sementara Syafi’i Ma’arif mengemukakan tiga teori berkenaan dengan munculnya kelompok fundamentalis dalam Islam; *pertama*, kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modernitas yang dinilai menyudutkan Islam kemudian berbalik mengadakan perlawanan terhadap modernitas dengan berbagai cara. *Kedua*, munculnya solidaritas Islam terhadap nasib yang menimpa saudara-saudara mereka di Palestina, Kashmir, Afganistan dan Irak. *Ketiga*, khusus untuk Indonesia, maraknya fundamentalisme di Nusantara lebih disebabkan oleh kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.

Menurut Tholkhatul Khoir, karakter Islam fundamentalis<sup>1</sup> adalah: 1) Fundamentalis Islam, dapat menekan sistem politik di negara lain, atas nama Islam (*penetrate the political system of other countries*). 2) Fundamentalis mereka memang para aktifis dan cukup bertenaga (*activist and vigorous enough*). 3) Fundamentalis menganggap Islam memang sebuah gerakan protes (*protest movement*) dunia ketiga melawan apa yang dianggap sebagai tradisi demokrasi Barat warisan imperialis dan kolonial Yahudi-Kristen. 4) Fundamentalis menganggap adanya kepatuhan total (*total adherence*) yang dituntut oleh Islam kepada semua pemeluknya. 5) Fundamentalis Islam tidak sekedar agama yang lebih politis, tetapi juga agama yang mempunyai sebuah orientasi kuat terhadap ajaran kolektif dan kelompok (*a strong orientation towards collective matters and groups*). 6) Fundamentalis Islam melakukan doktrin tentang jihad atau holy war menurut istilah yang sering digunakan. 7) Fundamentalis Islam menganggap perintah-perintah dan akidah

---

<sup>1</sup>Tholkhatul Khoir, “Tujuh Karakter Fundamentalisme Islam,” *Jurnal Al-Tahrir IAIN Ponorogo* 14, no. 01 (2014): 47–71.

Islam mempunyai pengertian tergesa-gesa (*sense of immediacy*) lebih besar dibanding agama-agama lain. Kasus paling ekstrim adalah tentang akhirat dan mati syahid.

## **LATAR BELAKANG SOSIO HISTORIS PERKEMBANGAN GERAKAN FUNDAMENTALIS DI TUJUAN WISATA WAKATOBI**

Berubahnya sistem pemerintahan pasca berpisahnya Kabupaten Wakatobi dari Kabupaten Buton pada tahun 2003 membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan berbagai elemen terutama dalam bidang pariwisata yang begitu mendunia. Daya tarik wisata Wakatobi ini bisa menarik para wisatawan, baik wisatawan luar negeri maupun wisatawan dalam negeri untuk berkunjung ke Wakatobi. Selain perkembangan wisata, elemen yang lain juga berkembang seperti pendidikan, ekonomi, termasuk di dalamnya perkembangan Islam. Bentuk Islam di Wakatobi menjadi sangat beragam.

Masyarakat Wakatobi bisa di bagi menjadi dua kekuatan Islam pasca otonomi daerah di Wakatobi, yaitu; modernis dan tradisional. Kelompok modernis ini sudah bisa memahami ajaran agama secara mendalam dan bisa memisahkan antara ajaran agama dan budaya yang di karenakan oleh pendidikan mereka sudah lebih bagus. Sedangkan kelompok Islam tradisional ini masih memahami ajaran agama seadanya dan belum bisa memisahkan antara ajaran agama dan budaya. Selain kelompok ini ditakutkan di daerah Wakatobi semakin berkembang kelompok-kelompok agama seperti kelompok islam liberal moderat dan radikal atau fundamental. Islam liberal dan moderat dengan penafsiran terbuka terhadap ajara Islam, sekalipun tidak sama persis, sedangkan Islam radikal atau fundamentalis memiliki paham penafsiran tertutup. Beberapa kelompok Islam seperti Jaringan Islam Liberal (JIL) adalah beberapa kelompok Islam yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok Islam yang beraliran terbuka, seperti Ahmadiyah, Gafatar, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Laskar Mujahidin, dan Ikhwanul Muslimin Indonesia.

Radikalisme atau fundamentalisme tidaklah muncul dari ruang hampa. Dalam teori sosial, Radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain. Dalam fakta sosial,

ada tiga asumsi yang mendasari keseluruhan cara berpikirnya, yaitu keteraturan sosial (*social order*), terdapat perubahan sekali waktu dan tidak ada fakta yang berdiri sendiri kecuali ada fakta penyebabnya. Karena radikalisme dapat dilihat dari beberapa penyebab. Masuknya paham radikalisme di Wakatobi dapat dilihat dari beberapa sebab, antara lain:

1. Adanya tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya. Di beberapa daerah yang ada di Indonesia, termasuk Wakatobi fenomena radikalisme atau fundamentalisme muncul sebagai akibat otoritas pemerintah. Keberadaan kelompok-kelompok ini di Wakatobi selalu mengalami kesulitan dari pihak Pemda baik dalam hal pendanaan maupun kepengurusan yang lainnya.
2. Faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termaksud di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Lebih tepat dikatakan hal itu sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama (wahyu suci yang absolut), karena gerakan radikalisme selalu megibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membelah agama, jihad, dan mati syahid.
3. Faktor kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural, di dalam masyarakat selalu ditemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaringan-jaringan kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya Muslim.

Pendapat lain dikemukakan oleh seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat:

1. Faktor ideologis Syariat Islam. Ideologis ini merupakan suatu pemikiran yang membahayakan muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti-Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan, tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam

memosisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. Munculnya terorisme disebabkan karena tidak berjalannya *sense of conception of justice*. Demokrasi dianggap sebagai sistem negara kafir. Dengan banyaknya wisatawan yang berdatangan ke Wakatobi

2. Faktor kebijakan pemerintah. Ketidak mampuan pemerintah dinegara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini, elit-elit pemerintah di negeri-negeri muslim belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tidak kekerasan (radikalisme) sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat.
3. Faktor media masa (pers) barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukn oleh umat Islam. Propaganda-propaganda lewat pers memang memiliki kekuatan dahsat dan sangat sulit untuk ditangkis sehingga sebagian “ekstrim” yaitu perilaku radikal sebagai reaksi atas apa yang ditimpakan kepada komunitas muslim. Lihat misalnya film *Fitna*, penggambaran tentang kiamat (film 2012), dan lainnya.
4. Secara umum faktornya adalah bentuk pemahaman terhadap ajaran Islam yang perlu untuk dirumuskan dan digunakan sebagai alternatif terhadap sistem yang berlaku sekarang, penerapan ajaran Islam secara praktis tidak hanya sebagai konsep yang abstrak, kelemahan Islam dalam politik dan lengsernya masa Orde Baru yang menyebabkan umat Islam frustrasi sehingga menjadi mayoritas yang diam. Islam dalam politik tahun 1980-an telah sampai kepada jalan buntu, beberapa intelektual Islam telah mengajukan jalan lain dengan membawa Islam ke jalan politik, Islam telah terdistorsi karena Islam telah dipahami secara parsial.

Pendapat lain dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi bahwa masuknya paham-paham fundamentalis di daerah Wakatobi bisa jadi disebabkan oleh:

1. Konsep *Din wa Daulah* (agama dan negara). Dalam konsep ini Islam dipahami sebagai sistem hidup total, yang secara

universal dapat diterapkan pada semua keadaan, waktu, dan tempat. Pemisahan antara agama dan negara tidak dapat diterima oleh kelompok fundamentalis, sehingga agama dan negara dipahami secara integralistik.

2. Kembali pada Alquran dan Sunah. Dalam konsep ini umat Islam diperintahkan untuk kembali kepada akar-akar Islam awal dan praktik Nabi yang sungguh-sungguh dalam mencari keaslian (otentitas) dan pembaruan. Jika umat Islam tidak kembali ke jalan yang benar dari para pendahulunya maka niscaya tidak akan selamat. Kembali kepada Alquran dan Sunah dipahami secara skriptual dan totalistik.
3. Keadilan sosial, nilai-nilai budaya Barat ditolak karena dianggap sesuatu yang asing bagi Islam. Media masa diupayakan untuk menyebarkan nilai praktik Islam yang otentik dari pada menyebarkan pengaruh budaya asing yang sekuler. Hal ini mensyaratkan penegakkan keadilan sosial ekonomi sehingga doktrin tentang zakat sangat ditekankan sehingga mampu memajukan kesejahteraan sosial dan mampu memperbaiki kesenjangan kelas di kalangan umat Islam.
4. Berpegang teguh pada kedaulatan syariat Islam. Tujuan utama umat Islam adalah menegakkan kedaulatan Tuhan di muka bumi ini. Tujuan ini bisa dicapai dengan membangun tatanan Islam yang memposisikan syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi. Dari pemahaman ini, maka agenda formalisasi syariat Islam menjadi landasan dasar bagi terbentuknya negara Islam sehingga syariat Islam benar-benar dapat diperlakukan dalam hukum positif, baik hukum perdata maupun jinayat.
5. Menempatkan jihad sebagai instrumen gerakan. Umat Islam diperintahkan untuk membangun masyarakat ideal sebagaimana telah digariskan dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu diperlukan adanya upaya menghancurkan kehidupan jahiliyah dan menaklukan kekuasaan-kekuasaan duniawi melalui jihad atau perang suci.
6. Perlawanan terhadap barat yang hagemonik dan menentang keterlibatan mendalam dari pihak Barat untuk urusan dalam negeri negara-negara Islam. Kelompok ini merasa harus mendeklarasikan perlawanan terhadap Barat karena umat Islam sudah

diperlakukan dengan tidak adil, baik secara politik, ekonomi maupun budaya.

Di Wakatobi terdapat destinasi wisata segitiga terumbu karang di dunia yang menjadi daerah potensial dengan perkembangan paham-paham fundamental. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke daerah Wakatobi. Tentu dengan masyarakat Wakatobi dengan pemeluk agama Islam 100%, tidak menginginkan budaya-budaya barat berkembang di daerah Wakatobi. Sehingga bisa mengakibatkan paham-paham radikal ini tumbuh dan berkembang di Wakatobi untuk membendung arus budaya barat yang di bawah oleh para wisatawan manca negara. Di sisi lain kebijakan bupati sebelumnya yang ingin mendirikan tempat ibadah seperti gereja dan wihara untuk menarik wisatawan yang beragama non muslim untuk berwisata di Wakatobi, sehingga wisatawan bisa beribadah di gereja dan wihara. Kebijakan ini menimbulkan penolakan di masyarakat dan kelompok-kelompok keagamaan. Perlawanan inilah yang bisa berpengaruh pada kelompok-kelompok keagamaan yang radikal untuk menentang kebijakan dan paham-paham barat yang muncul di Wakatobi.

### **KELOMPOK-KELOMPOK KEAGAMAAN DI WAKATOBI**

Dari 71 organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, organisasi keagamaan yang ada di Kabupaten Wakatobi sedikit yang mendaftarkan lembaganya. Sebaliknya lembaga-lembaga keagamaan seperti Islamic Center Muaz Bin Jabal tidak mendaftarkan lembaganya. Organisasi-organisasi yang terkait dengan kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Wakatobi adalah: Lembaga Muslimah Nahdatul Ulama WAKATOBI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim, Wahda Islamiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Yayasan NUR ILAYHI Pusat Wangi-Wangi, Lembaga Adat Kadie Mandati, Lembaga Adat mandati Besar (LEAMA), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan DPD II Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) Kabupaten Wakatobi<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup>RB Kesbangpol Kab. Wakatobi, Wawancara, Agustus 2016.

Lembaga keagamaan yang baru diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada 14 Februari 2016, yaitu Islamic Center Muaz Bin Jabal (ICM) belum mendaftarkan secara resmi kelembagaannya di Dinas Kesbangpol Kabupaten Wakatobi. Pihak Dinas Kesbangpol Kabupaten Wakatobi sudah menyampaikan kepada pengurus ICM Kabupaten Wakatobi untuk mendaftarkan lembaganya, namun sampai pada saat ini pihak dari ICM Kabupaten Wakatobi belum mendaftarkan diri. Keberadaan lembaga ICM Kabupaten Wakatobi menjadikan semakin beragamnya kelompok-kelompok Islam yang ada di Wakatobi yang menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Di berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol selalu mengundang pengurus ICM untuk mengikuti kegiatan namun para pengurus tidak hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Bukan berarti lembaga-lembaga keagamaan yang lain yang sudah memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Dinas Kesbangpol Kabupaten Wakatobi dapat memenuhi syarat-syarat seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2012. Secara yuridis lembaga-lembaga keagamaan ini seharusnya tidak dikeluarkan surat keterangan terdaftar apabila tidak memenuhi syarat. Pada Permendagri No 33 tahun 2012 ayat 10 Permohonan pendaftaran Orkemas ditolak apabila dokumen kelengkapan Orkemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdapat antara lain:

1. Organisasi kemasyarakatan tersebut termasuk organisasi terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memiliki asas organisasi yang bertentangan dengan Pancasila;
3. Tidak sesuai ruang lingkup Orkemas;
4. Terjadinya konflik kepengurusan;
5. Berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik atau Orkemas sayap partai politik;
6. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, dan/atau atribut yang mengandung unsur permusuhan, penodaan, penghinaan, bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
7. Menggunakan nama, lambang, bendera, tanda gambar, atribut, simbol, cap stempel, kop surat, yang sama atau menyerupai dengan aparatur negara atau lembaga negara atau instansi pemerintahan atau negara lain atau lembaga/badan internasional

atau organisasi gerakan separatis; dan/atau

8. Nama Orkemas yang menggunakan bahasa daerah dan/atau bahasa asing, dan tidak mencantumkan arti nama dalam bahasa Indonesia<sup>3</sup>.

Persyaratan-persyaratan ini seharusnya dijadikan dasar untuk melegalkan sebuah lembaga di dalam sebuah wilayah. Sehingga lembaga-lembaga ini bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan daerah. Verifikasi data harus dilakukan sebelum mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenaran lembaga tersebut. Berdasarkan data di lapangan, lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi masih banyak persyaratan administrasi yang belum dipenuhi oleh lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi. Dalam form pengisian persyaratan administrasi masih ada persyaratan yang belum terpenuhi seperti:

1. Tujuan dan program kerja organisasi;
2. Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama organisasi;
4. Foto kantor atau sekretariat Orkemas, tampak depan yang memuat papan nama;
5. Keabsahan kantor atau sekretariat Orkemas dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola;
6. Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota Organisasi;
7. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
8. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
9. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan Orkemas setiap akhir tahun yang

---

<sup>3</sup>Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah," n.d.

- ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
10. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya;
  11. Rekomendasi dari kementerian agama untuk Orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
  12. Rekomendasi dari kementerian dan SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk Orkemas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  13. Rekomendasi dari kementerian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk Orkemas serikat buruh dan serikat pekerja; dan
  14. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk Orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Dari persyaratan administrasi yang belum dipenuhi oleh lembaga DPD HTI Kabupaten Wakatobi salah satunya adalah mengenai Surat keterangan domisili organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat atau sebutan lainnya memang belum terpenuhi. Peneliti mencoba mencari alamat sekretariat lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi yang sesuai alamat yang tertulis dalam kop surat beralamatkan Jl. La Ode Tindoi No. 6 Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi.

Fakta di lapangan bahwa alamat sekretariat lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi memang ada, tetapi tidak dijadikan sekretariat. Hal ini dibenarkan oleh Camat Wangi-wangi bahwa selama ini belum pernah ada yang memohon untuk surat keterangan domisili baik itu pengurus maupun simpatisan lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi<sup>4</sup>. Salah seorang warga yang bertempat tinggal di depan sekretariat lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi menjelaskan bahwa pada tahun 2015 memang di sekretariat tersebut ada yang menempati, memasang papan nama dan bendera lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi tapi hanya beberapa minggu saja dan yang bersangkutan kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Mereka bertemu dengan masyarakat hanya ketika di masjid saja,

---

<sup>4</sup> HD Pejabat Kecamatan, Wawancara, Agustus 2016.

mereka sering berceramah dan mengajak untuk mengaji tiap selesai solat magrib.

Data di atas menunjukkan bahwa dikeluarkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) oleh Dinas Kesbangpol tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2012. Para pengurus lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi melakukan berbagai cara untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut dengan cara-cara yang tidak baik, dengan memalsukan sekretariat. Sehingga bisa dikatakan bahwa lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi masih ilegal secara yuridis.

### **PAHAM DAN AKTIFITAS KELOMPOK-KELOMPOK KEAGAMAAN DI WAKATOBI**

Gerakan yang dilakukan organisasi keagamaan ini meliputi pendidikan dan pembinaan umat dengan wawasan Islam, melancarkan pertarungan pemikiran, dan aktivitas politik. Dalam rangka menjalankan agenda politiknya, HTI menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi yang menentang para penguasa yang tidak menerapkan sistem politik Islam, syariah dan hukum-hukum Islam menurut konsepsi mereka, mengkhianati amanat rakyat dan melakukan penindasan. Pemikiran inilah yang mendasari pilihan strategi perjuangan mereka dengan tidak melibatkan diri dalam proses-proses politik resmi.

AD/ART lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi memiliki faham gerakan dakwah yang berazaskan Islam di dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perkumpulan ini bersifat pemikiran, peka terhadap urusan umat, tanpa kekerasan, mandiri, non partisan dan nirlaba. Maksud dan tujuan lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi adalah melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakan syariat Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya (*kaffah*).

Kalau dilihat secara kasat mata lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi memang konsisten dalam menyebarkan syariat Islam. lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi selalu berdakwah disetiap masjid yang mengundang para pengurusnya untuk berdakwah. Namun disisin lain secara terang-terangan dalam setiap dakwahnya mereka selalu meneriakkan kata jihad dan menolak

pancasila serta mengkafirkan pemimpin yang dipilih melalui sistem demokrasi. lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi selalu meneriakkan negara Khilafah dan pemberlakuan sistem hukum Islam secara kaffah serta syariat Islam harus ditegakkan dan mengkatikan hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia.

Hal ini dikemukakan oleh salah satu jamaah masjid al-Maidah yang menjadi pusat lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi menjalankan dakwah: Pengajian-pengajian HTI sudah tidak bisa dimaklumi dengan alasan demokrasi. Orator mereka jelas selalu melakukan upaya makar terhadap NKRI. Mereka menganggap hormat pada bendera merah putih adalah dosa atau syirik. Melarang menyanyikan lagu kebangsaan dan sebagainya. Mereka dengan terbuka menolak demokrasi dan pancasila. Pada banyak kesempatan, ceramah pimpinan HTI juga sudah sangat mengkhawatirkan. Ada banyak seruan “jihad” dengan suara menggelegar. Pada intinya mereka ingin mengubah sistem demokrasi menjadi khilafah, apapun caranya.

Di sisi lain cara-cara perekrutan kader-kader baru selalu dilakukan dengan beragam modus. Bukan sekali dua kali saya mendengar cerita rekreasi jebakan ala HTI. Warga, umumnya ibu-ibu, diajak rekreasi ke pantai gratis, transportasi mobil dan makan disediakan. Namun setelah sampai di lokasi, ternyata acaranya ceramah atau pengajian HTI. Setelah itu mereka diberi buletin atau majalah tentang negara khilafah dan menjelek-jelekkan pemerintah yang ada. Namun dari beberapa tulisan yang saya baca, semuanya materi mentah yang sangat mudah dibantah, bahkan cenderung gagal paham. Tapi semua hal tersebut dikemas sedemikian rupa untuk membentuk persepsi bahwa negara demokrasi itu salah total, harus dirubah ke sistem khilafah.

Satu-satunya alasan mengapa HTI sampai saat ini belum berontak atau perang terbuka, karena mereka tahu jumlah anggotanya masih sedikit. Pada saat kasus pencarian terduga teroris Santoso dan kejadian bom tamrin city, dari pihak kepolisian resort Kabupaten Wakatobi selalu mengawasi beberapa anggota pengurus lembaga DPD II HTI Kabupaten Wakatobi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi teror bom tidak masuk ke wilayah Wakatobi. Pengawasan itu dilakukan sampai tiga kali dari pihak intel Polres Wakatobi mencari data ke kantor Dinas Kesbangpol

kabupaten Wakatobi. Yang dicurigai ada kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Kabupaten Wakatobi yang bersifat radikal yang menjurus pada terorisme.

Penegakkan syariat Islam sudah seharusnya diperjuangkan oleh umat muslim, namun dalam pelaksanaannya tidak dibenarkan untuk memaksakan hal itu. Rasulullah Saw. menyampaikan dakwahnya dengan hikmah. Sehingga banyak kaum Nasrani dengan sendiri masuk ke dalam ajaran agama Islam. Islam merupakan agama yang damai, tidak mengenal kekerasan. Islam merupakan agama yang selalu mengajar umatnya untuk selalu mengingatkan dijalan kebenaran.

Gerakan yang dilakukan oleh salah satu kelompok keagamaan ini meliputi pendidikan dan pembinaan umat dengan wawasan Islam, melancarkan pertarungan pemikiran, dan aktivitas politik. Dalam rangka menjalankan agenda politiknya menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi yang menentang para penguasa yang tidak menerapkan sistem politik Islam, syariah dan hukum-hukum Islam menurut konsepsi mereka, menghinai amanat rakyat dan melakukan penindasan. Pemikiran inilah yang mendasari pilihan strategi perjuangan mereka dengan tidak melibatkan diri dalam proses-proses politik resmi.

Pengajian-pengajian kelompok keagamaan ini sudah tidak bisa dimaklumi dengan alasan demokrasi. Orator kelompok keagamaan ini jelas selalu melakukan upaya makar terhadap NKRI. Mereka menganggap hormat pada bendera merah putih adalah dosa atau syirik. Melarang menyanyikan lagu kebangsaan dan sebagainya. kelompok keagamaan ini dengan terbuka menolak demokrasi dan Pancasila. Sehingga mereka ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi negara Khilafah. Inilah yang menjadi potensi radikal yang terjadi di Wakatobi karena kelompok keagamaan ini mulai berkembang di Wakatobi dengan misi untuk merekrut pengikut yang lebih banyak lagi. Sehingga bisa dikategorikan kelompok ini radikal dalam ideologi yang ingin mengubah Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara.

## **PENUTUP**

Latar belakang sosio historis mengapa gerakan fundamentalis berkembang di daerah tujuan wisata di Wakatobi adalah faktor tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya, faktor emosi

keagamaan, faktor kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme, faktor ideologis syariat Islam, faktor kebijakan pemerintah, faktor media massa (pers) Barat yang selalu memojokkan umat islam juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukn oleh umat Islam. Faktor umumnya adalah bentuk pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam yang perlu untuk dirumuskan dan disodorkan sebagai alternatif terhadap sistem yang berlaku sekarang, konsep *Dīn wa Dawlah* (agama dan negara), kembali pada Alquran dan sunnah, keadilan sosial, nilai-nilai budaya barat ditolak karena dianggap sesuatu yang asing bagi Islam, berpegang teguh pada kedaulatan syariat Islam, menempatkan jihad sebagai instrumen gerakan. Perlawanan terhadap Barat yang hegemonik dan menentang keterlibatan pihak Barat untuk urusan dalam negeri negara-negara Islam.

Potensi radikal di Kabupaten Wakatobi sudah nampak dengan adanya kelompok keagamaan yang radikal dalam ideologi. Kelompok keagamaan ini dengan terbuka menolak demokrasi dan pancasila. Sehingga mereka ingin mengubah pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi negara Khilafah. Inilah yang menjadi potensi radikal yang terjadi di Wakatobi karena kelompok keagamaan ini mulai berkembang di Wakatobi dengan misi untuk merekrut pengikut yang lebih banyak lagi. Di sisi lain kelompok ini hadir untuk membendung budaya-budaya Barat yang dibawa oleh wisatawan asing ke Wakatobi. Sehingga bisa dikategorikan kelompok ini radikal dalam ideologi yang ingin mengubah Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- BNPT. *Diary Perdamaian (Menenal, Mewaspada, Dan Mencegah Terorisme Di Kalangan Generasi Muda*. Jakarta: BNPT, 2014.
- Burhanudiin, ed. *Syariat Islam: Pandangan Muslim Liberal*. Jakarta: Jaringan Islam Liberal and the Asia Foundation, 2003.

GM Kesbangpol Kab. Wakatobi. Wawancara, Agustus 2016.

HD Pejabat Kecamatan. Wawancara, Agustus 2016.

Khoir, Tholkhatul. "Tujuh Karakter Fundamentalisme Islam."  
*Jurnal Al-Tahrir IAIN Ponorogo* 14, no. 01 (2014).

La D Warga Masyarakat. Wawancara, Agustus 2016.

La S Warga Masyarakat. Wawancara, Agustus 2016.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah," n.d.

RB Kesbangpol Kab. Wakatobi. Wawancara, Agustus 2016.

SH Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Wawancara, Agustus 2016.

SJ,. Wawancara, Agustus 2016.

SR Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Wawancara, Agustus 2016.

U Warga Negara. Wawancara, Agustus 2016.

Wahid, Abdurrahman. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute, 2009.